

Perempuan Nelayan

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan

Artikel

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Naufaludin Ismail

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan

Endah Kusuma Wardhani

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara

Yekti Wahyuni

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan

Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (Human Rights Diplomacy, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2017



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan / *Fisherwomen* iii

Artikel / *Articles*

- Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias / *The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation* 295-309
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
- Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan / *Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance*..... 311-321
Naufaludin Ismail
- Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina / *Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines*..... 323-331
Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling
- Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan / *Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan*..... 333-344
Endah Kusuma Wardhani
- Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara / *Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta*..... 345-357
Yekti Wahyuni
- Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung / *Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung*..... 359-368
Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / *Interview*

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif / *Dedi Adhuri: Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy*..... 369-374
Abby Gina

Kata Makna / *Words and Meaning*

Nur Iman Subono 375-376

Profil / *Profile*

Masnua, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan / *Masnua, Fisherwomen Rights Defender*..... 377-383
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / *Book Review*

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak / *When Development Disregards Women's and Children's Rights*..... 385-388
Naufaludin Ismail

Perempuan Nelayan

Fisherwomen

“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) dalam konteks keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis,

tabungan investasi dan kredit, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, membentuk “*champions*” (yang dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017).

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi ini juga kami narasikan dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia. (Anita Dhewy)

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 295-309, 3 tabel, 10 daftar pustaka

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: existence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 311-321, 2 tabel, 10 daftar pustaka

This paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of fisher card and insurance as a form of legitimacy and recognition of their identity as fisherwomen. The strong patriarchal culture in various society layers, caused the recognition of the political identity of fisherwomen has become difficult, so a feminist analysis toward policy on fisher card and insurance is needed so that women can engage as active subjects in the policy.

Keywords: fisherwomen, patriarchy, sexism, legal identity, feminist policy

Tulisan ini akan berfokus pada analisis feminis pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan. Tulisan ini juga akan menganalisis pengalaman dua perempuan nelayan di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang berhasil mendapatkan akses identitas hukum berupa kartu dan asuransi nelayan sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi identitas politik mereka sebagai perempuan nelayan. Kuatnya budaya patriarki di berbagai lapisan sosial-masyarakat menyebabkan pengakuan atas identitas hukum perempuan nelayan menjadi sulit untuk direkognisi, sehingga diperlukan sebuah analisis feminis atas kebijakan kartu dan asuransi nelayan agar perempuan bisa terlibat sebagai subjek aktif di dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci: perempuan nelayan, patriarki, seksisme, identitas hukum, kebijakan feminis

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling (College of Social Work and Community Development University of the Philippines – Diliman, Metro Manila, Filipina)

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 323-331, 1 tabel, 7 daftar pustaka

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case

studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

Endah Kusuma Wardhani (Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Indonesia)

**Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi
Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium
dan Kamal Muara, Penjaringan**

***Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and
Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium
and Kamal Muara Village, Penjaringan***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 333-344, 13 daftar
pustaka

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggeser para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah

tangga nelayan akan tergusur dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah terjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

Yekti Wahyuni (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian
Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

**Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan
Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke,
Jakarta Utara**

***Productive, Reproductive and Community Roles of Women
Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 345-357, 2
gambar, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This study aims to find out the productive, reproductive and community roles of fisherwomen in Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. The subjects of the study were two fisherwomen who work in the processing of green shells, as owners and as shell-peeler laborer. The study explores women's experience as breadwinners in the marine sector including the experience as a catch fisherwomen. The results showed that the role of fisherwomen in the productive and improvement of the family economy is very real, either directly or indirectly as a fisherwomen or processor of marine products. Three roles of fisherwomen in Muara Angke, sub-district Penjaringan, North Jakarta namely productive, reproductive, and social community. The fisherwomen took part in supplementing family income. In addition to performing reproductive roles related to domestic work, fisherwomen also have an active social role in social movements in order to maintain their living spaces and their spheres. The study found the tendency of women to abandon the role of capture fisherwomen when carrying out the role of biological reproduction.

Keywords: fisherwomen, economic roles, social roles, production roles, reproductive roles, social community roles

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan nelayan yang bekerja di bidang pengolahan kerang hijau, sebagai pemilik dan sebagai buruh pengupas kerang. Penelitian menggali pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah di sektor kelautan termasuk pengalaman sebagai nelayan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan dalam produksi dan peningkatan ekonomi keluarga sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai nelayan maupun pengolah hasil laut. Tiga peran perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yakni produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Perempuan nelayan ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Selain menjalankan peran reproduksi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perempuan nelayan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan dengan aktif dalam gerakan sosial dalam upaya mempertahankan ruang hidup dan ruang kelolaan. Penelitian menemukan kecenderungan perempuan meninggalkan

peran sebagai nelayan tangkap ketika menjalankan peran reproduksi biologis.

Kata kunci: perempuan nelayan, peran ekonomi, peran sosial, peran produksi, peran reproduksi, peran sosial kemasyarakatan

Gadis Arivia & Abby Gina (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 359-368, 4 tabel, 5 daftar pustaka

This study examines the role of women prawn farmers in Dipasena, East Rawajitu District, Tulang Bawang, Lampung and what it means for human development in Indonesia. Several focus group discussions and indepth interviews with women prawn farmers and fishermen community were conducted to collect data and understand comprehensively the issues that women prawn farmers face in a patriarchal culture where they are not acknowledged as women workers. This paper uses a feminist perspective on women and work and Martha Nussbaum's capability

categories. This paper concludes that women's roles and contribution in fishery and in national development is not recognized and not accommodated in national and local policies. Women's role in fishery industry is considered non-existent in this society and therefore restrict their potential and meaningful existence and respect on equal human dignity.

Keywords: women prawn farmers, capabilities, human dignity, development, Martha Nussbaum

Penelitian ini melihat peran perempuan petambak udang di Dipasena, Kabupaten Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung dan melihat apa dampaknya pada pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para petambak perempuan dan komunitas nelayan dilakukan untuk pengumpulan data guna memahami secara komprehensif persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petambak di dalam masyarakat patriarki, di mana mereka tidak diakui sebagai petambak perempuan. Tulisan ini menggunakan perspektif feminis tentang perempuan dan kerja dan pendekatan kapabilitas dari Martha Nussbaum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan dan pembangunan nasional tidak diakui dan tidak diakomodasi dalam kebijakan nasional dan daerah. Peran perempuan dalam industri perikanan tidak diakui dalam masyarakat sehingga membatasi eksistensi mereka yang potensial dan bermakna serta membatasi penghargaan atas kesetaraan manusia.

Kata Kunci: perempuan petambak udang, kapabilitas, kemartabatan manusia, pembangunan, Martha Nussbaum



Dedi Adhuri:

Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif

Dedi Adhuri:

Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy

Abby Gina

Jurnal Perempuan

abbygina@jurnalperempuan.com

Dr. Dedi Adhuri adalah peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia juga pernah mengajar mata kuliah Antropologi Maritim di Universitas Indonesia sebelum mengikuti program postdoctoral di WorldFish Center di Penang pada tahun 2005. Tiga tahun terakhir, beliau mengajar mata kuliah yang sama pada Jurusan Antropologi Universitas Diponegoro, Semarang. Dedi Adhuri telah

lebih dari 20 tahun menggeluti isu-isu masyarakat pesisir dan perikanan. Ia aktif dalam berbagai penelitian dan menulis berbagai artikel ilmiah terkait konflik sosial, etnisitas, pengelolaan sumber daya laut, konflik perikanan, rehabilitasi, dan pembangunan masyarakat pesisir. Ia menempuh pendidikan pada bidang antropologi di Universitas Indonesia dan The Australian National University.

Misi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kabinet Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia namun hingga saat ini harapan tersebut masih belum tercapai. Bagaimana pandangan Bapak soal itu?

Misi ini terhitung baru bagi kita (Indonesia). Jokowi membahasakannya "Menghadap ke laut". Ini kebijakan yang digadang-gadang oleh Jokowi sejak dia pencalonan dulu dan kemudian diimplementasikan saat beliau sudah menjadi presiden. Karena misi ini memang baru, maka kita tidak bisa berharap bahwa Indonesia bisa langsung mengoptimalkan posisinya sebagai poros maritim. Pertama, kita bisa mundur pada masa sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Pada tahun 2009 pemerintah kita baru mendirikan Kementerian Kelautan. Ini artinya *concern* terhadap laut memang suatu hal baru bagi kita (Indonesia). Kedua, laut merupakan kehidupan yang khusus, ia tidak mudah untuk ditaklukan, sehingga memang dibutuhkan waktu yang lama untuk mengoptimalkan program-program terhadap laut dan juga melihat hasilnya. Ketiga, jika kita perhatikan kondisi saat ini, sesungguhnya kebijakan Jokowi tentang poros maritim masih belum solid. Hal ini bisa terlihat dari belum adanya *blue print* pada rezim saat ini tentang apa itu poros maritim. Jadi saat ini, masing-masing departemen yang terkait dengan laut mendefinisikan masing-masing tentang apa itu poros maritim. Hal ini tentu berdampak pada sinergi antara satu departemen dengan departemen lainnya menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan sensus 2003 hingga 2013 diketahui bahwa jumlah rumah tangga nelayan berkurang dari 1.600.000 menjadi 800.000 rumah tangga. Bagaimana pandangan Bapak tentang itu?

Pertama sebenarnya kita harus melihat apa penyebab rumah tangga nelayan ini turun jumlahnya. Saya belum tahu pasti apa penyebab turunnya, tetapi kalau kita melihat dari perspektif pengelolaan sumber daya laut, fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah indikasi yang positif. Mengapa baik? Karena, meskipun jumlah total ikan di laut kita masih banyak, kalkulasi terakhir dari KKP menunjukkan bahwa stok ikan kita adalah 15,5 juta ton per tahun. Akan tetapi jika kita melihat kondisi kelompok ikan tertentu dan kita melihat status sumber daya ikan kita di masing-masing wilayah pengolahan perikanan, sebenarnya sudah banyak ikan yang *overexploited*. Saya duga sumber daya ikan yang telah *overexploited* adalah sumber daya ikan yang ada di pesisir, yang menjadi target utama kegiatan penangkapan ikan di Indonesia, karena 90% perikanan di Indonesia pelakunya adalah nelayan skala kecil, yakni

nelayan dengan kapal berukuran hingga 5 atau 10 GT. Oleh karena itu, perairan yang sangat dieksploitasi adalah laut pesisir, ini menyebabkan sumber daya ikan di pesisir menjadi *overexploited*.

Sesungguhnya penambahan jumlah nelayan yang terjun ke laut tidak hanya memperburuk kondisi sumber daya alam tetapi juga memperburuk kondisi nelayan itu sendiri. Sehingga jika ada penurunan jumlah keluarga nelayan dalam perspektif pengolahan itu malah lebih baik karena *pressure* pada sumber daya ikan akan berkurang. Persoalannya adalah kemana mereka (para nelayan) pergi? Apakah keluar dari sektor perikanan untuk hidup yang lebih baik atau tidak? Jika iya ini artinya baik, tapi jika tidak bagaimana? Jika kita lihat, pekerjaan pada sektor-sektor lain membutuhkan keterampilan khusus yang berkaitan dengan level pendidikan, sementara level pendidikan formal nelayan cenderung rendah, sehingga serapan sektor lain pada komunitas nelayan menjadi rendah. Mereka (para nelayan) keahliannya di bidang laut saja. Ini yang perlu kita pertanyakan.

Apakah penerapan Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik berdampak secara sosial, ekonomi dan ekologis bagi nelayan?

Menurut saya kebijakan itu substansinya baik. Hal ini terkait dengan kondisi sumber daya pesisir kita yang sudah *overexploited*. Sebagian orang menganggap bahwa pengoperasian cantrang itu agak destruktif ya, karena itu pelarangan terhadap cantrang diharapkan akan memperbaiki kondisi sumber daya sehingga untuk jangka waktu panjang akan memperbaiki kesejahteraan hidup nelayan juga karena dengan pelarangan tersebut produktivitas perairan pesisir akan meningkat.

Masalahnya adalah kebijakan dibuat tanpa melalui konsultasi yang memadai. Pertama, hal ini mengejutkan berbagai pihak. Kedua, dampak pelarangan itu tidak diantisipasi dan tidak dicarikan solusi cepat, padahal bagi beberapa orang, terutama nelayan dengan cantrang kecil, melaut hari ini menentukan hidup mereka. Apakah mereka bisa makan hari itu atau tidak? Apakah bisa menyekolahkan anak atau tidak? Larangan menggunakan alat tangkap tanpa menyediakankan solusi alternatif akan menimbulkan masalah serius bagi para nelayan kecil.

Jadi *long term*-nya pelarangan ini kemungkinan akan berdampak baik karena akan berpengaruh pada sumber daya perikanan, tetapi yang harus dipikirkan adalah *short term*, dampak ekonominya. Menurut saya pertimbangan

ini (*short-term*) *missing* dari kebijakan Ibu Susi, seperti halnya pembagian kapal dan pembagian alat-alat tangkap alternatif, ini bermasalah dan berlarut-larut. Saat ini kita dalam tahun ke-3.

Bagaimana dampak pelarangan cantrang pada kehidupan nelayan kecil khususnya nelayan perempuan?

Mereka jadi tidak bisa melaut ya. Bagi nelayan kecil melaut hari ini menentukan keberlangsungan, menentukan hidup hari ini dan esok. Jadi begitu mereka harus berhenti melaut, dampaknya akan sangat serius pada ekonomi rumah tangga nelayan. Laki-laki nelayan tidak bisa melaut menjadi tidak bisa bekerja, untuk perempuan ini juga menjadi sangat serius karena keperluan domestik perempuan yang *in-charge*. Ada atau tidak ada uang, mereka harus menyediakan pangan. Dampak ini sama seriusnya bagi laki-laki dan perempuan.

Di beberapa daerah ada sejumlah nelayan yang benar-benar berhenti melaut karena Permen tersebut dan menjadi pengangguran atau bekerja serabutan. Bagaimana pandangan bapak atas dampak sosial ini?

Pada tahun 2015, saya ke Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Di sana, saya pergi ke pulau di Podang-Podang, Sulawesi Selatan. Di pulau itu nelayannya adalah nelayan cantrang. Setidaknya ada 32 kelompok cantrang di situ. 90% nelayan di sana bergabung dalam kelompok-kelompok itu. Pada saat itu, saya bertemu kepala desa, tidak lama ibu-ibu datang mengerumuni. Mereka menangis. Kebetulan pada saat itu, Kapolsek yang bertugas sangat tegas dalam melindungi sumber daya laut terutama karang. Semua dilarang menggunakan cantrang, sementara di tempat lain penggunaan cantrang masih diperbolehkan, karena implementasi Permen ini masih diundur-undur, tapi di tempat itu aturan ini diberlakukan secara ketat. Kebetulan pada saat itu adalah bulan puasa. Saat itu warung-warung penjual makanan di daerah itu tutup. Mereka tidak bisa hidup karena satu-satunya alat tangkap yang mereka gunakan adalah cantrang. Sehingga dampak pelarangan ini menjadi sangat serius bagi komunitas-komunitas tertentu.

Dalam UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, perempuan hanya diakui perannya dalam keluarga nelayan dan bukan profesi. Bagaimana pandangan Bapak soal ini?

Kehidupan nelayan seringkali diasosiasikan hanya sebatas sebagai penangkap ikan dan diasosiasikan sebagai dunia profesi laki-laki, sayangnya peraturan perundangan juga terpengaruh oleh konotasi semacam itu. Menurut saya ini keliru. Pertama, di sebagian tempat perempuan terlibat langsung dalam proses penangkapan. Kedua, pendefinisian sempit bahwa nelayan hanya sebatas penangkap ikan saja sebenarnya adalah pendefinisian yang tidak tepat dari segi ekonomi nelayan, karena sebenarnya ekonomi nelayan harus dilihat sebagai sebuah kesatuan integral antara penangkapan, pengolahan pascapanen, pemasaran dan konsumsi.

Bila kegiatan kenelayan dipahami hanya sekadar kegiatan penangkapan saja dampaknya adalah definisi turunan dari itu hanya menunjukkan laki-laki sebagai objek dari peraturan tersebut dan perempuan didiskriminasi karena *excluded* dalam pendefinisian. Kita tahu bahwa bukan hanya proses penangkapan yang penting dalam dunia kenelayan, tetapi pengolahan pascapanen dan pemasaran juga sangat menentukan, karena salah satu karakteristik sumber daya ikan itu *perishable* (mudah rusak). Jadi meskipun nelayan bisa menangkap banyak ikan tapi bila pengolahan pascapanen dan penjualannya bermasalah nelayan tidak akan mendapatkan banyak uang, bahkan dibanyak kasus, banyak nelayan yang harus membuang kembali hasil tangkapannya ke laut karena tidak laku dijual. Di banyak tempat, tokoh kunci yang terlibat dalam pascapanen dan pemasaran adalah perempuan. Ini menurut saya, definisi formal kenelayan harus diubah, dimodifikasi, diadaptasi, sehingga definisinya holistik dan integral agar setiap orang yang terlibat dalam dunia kenelayan atau kehidupan yang berbasis pada sumber daya perikanan *included*. Definisi nelayan harus inklusif, sehingga perempuan tidak *excluded* dalam kebijakan-kebijakan, termasuk dalam program-program pemberian bantuan, pemberian pelatihan dan lainnya.

Sejauh apa manfaat kartu nelayan bagi nelayan? Mengapa masih sangat sedikit perempuan yang dapat mengaksesnya?

Ini penting ya. Kembali lagi pada pengelolaan perikanan, sebelumnya saya menyatakan bahwa meskipun sumber daya ikan di Indonesia jumlahnya banyak, tapi kalau kita lihat per jenisnya, sebagian dari itu sudah *overexploited*. Kalau kondisinya seperti itu maka harus ada pengaturan tentang penangkapan ikan, jangan sampai pembangunan perikanan mengarahkan peningkatan atas eksploitasi terhadap ikan-ikan yang

sudah *overexploited*. Ini tidak sekadar menjadikan sumber daya laut dan perikanan semakin rusak tetapi juga menjerumuskan nelayan ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Kalau ikan tidak ada atau semakin sedikit maka kebutuhan biaya operasi dan waktu untuk mendapat jumlah tangkapan yang sama akan menjadi semakin meningkat dan dampaknya adalah kemiskinan akan bertambah. Di sinilah perlunya kartu nelayan.

Pertama, pemberian kartu nelayan bisa dijadikan sebuah instrumen untuk mengidentifikasi siapa saja nelayan kita dan juga memberikan pengaturan-pengaturan dalam hal pengelolaan sumber daya ikan. Kedua, nelayan adalah penghidupan yang memiliki karakteristik khusus, ia berbeda dengan penghidupan-penghidupan lain yang berbasis pada sumber daya daratan. Pekerjaan mereka lebih berbahaya, hal ini disebabkan oleh karakteristik laut. Fisik manusia juga terbatas untuk bisa mengakses sumber daya laut, sehingga setiap bekerja, nelayan terancam nyawanya. Ini tidak sama dengan kegiatan bertani, dalam kegiatan bertani tidak ada ancaman bahaya terhadap nyawa, tetapi dalam nelayan, tiap saat selalu terancam entah karena ombak dan lainnya. Seiring dengan perubahan iklim kondisi ini semakin parah, cuaca ekstrem dan sulit diprediksi, sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa nelayan menjadi semakin tinggi. Kartu nelayan adalah alat yang bisa dipakai untuk mengenali nelayan sedemikian rupa sehingga program-program bantuan khusus bisa diberikan, jadi pemberian bantuan yang salah arah bisa dihindari dengan keberadaan kartu nelayan itu.

Lalu dalam hal mengapa sulit bagi perempuan untuk mengaksesnya, kita kembali pada persoalan pendefinisian. Pertama, definisi nelayan harus dikoreksi. Kedua, kita harus memeriksa kembali realitas sosiologis-antropologisnya, sejauh apa keterlibatan perempuan di dalam kegiatan kenelayanan. Jadi setahu saya meskipun secara umum masih jarang perempuan yang ikut ke laut lepas, tapi trennya semakin hari semakin meningkat. Selain itu, pun perempuan tidak ikut ke tengah laut, mereka terlibat dalam pengumpulan ikan atau kerang di pesisir. Pengumpulan ikan dan kerang di pesisir banyak dilakukan oleh perempuan. Dari Sabang hingga Merauke, saya melihat banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini. Secara konseptual kita menyebut ini sebagai *gleaning*. Peran ini penting karena hasil tangkapan ini seringkali menjadi sumber pasokan protein utama dalam konsumsi keluarga. Jadi meskipun hasil tangkapan ini tidak dipakai untuk mendatangkan *income* tapi ini sangat penting dalam pemenuhan protein dalam rumah tangga

nelayan. Seringkali perempuan terlibat pada kegiatan ini dan pengolahan pascapanen.

Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendefinisikan ulang apa itu nelayan dan perempuan nelayan sehingga sesuai dengan realitas sosiologis-antropologisnya. Dengan koreksi pada pendefinisian diharapkan agar perempuan tidak didiskriminasi lagi dalam kebijakan-kebijakan perikanan dan kelautan.

Menurut Bapak apa hambatan terbesar dalam pengakuan terhadap perempuan yang berprofesi sebagai nelayan?

Saya kira hambatan pada administrasi dan budaya ya. Di banyak tempat, kita sudah terlanjur mengadopsi gagasan bahwa nelayan adalah kerja ke laut dan dalam kehidupan sehari-hari kerja nelayan diasosiasikan dengan laki-laki. Ini adalah bagian dari hambatan budaya. Hal ini diperkuat oleh definisi formal yang menyebutkan nelayan itu adalah orang yang menangkap ikan dengan konotasi di laut. Dengan demikian, perempuan terhambat secara ganda. Pada satu pihak, budaya juga cenderung menganggap dunia perikanan sebagai dunia maskulin kemudian cara pikir itu disegel atau dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sensitif gender.

Di beberapa tempat memang perempuan tidak terlibat dalam penangkapan ikan di laut, tapi di tempat lain, perempuan terlibat dalam penangkapan ikan di laut. Menurut saya, keterlibatan perempuan dalam penangkapan ikan di pesisir juga menjadi penting, karena ini berhubungan dengan kesehatan dan kecerdasan anak di dalam rumah tangga nelayan. Selama ini *gleaning* tidak didefinisikan sebagai nelayan karena fungsinya dianggap tidak terlalu penting padahal ini penting.

Di Dipasena, kami menemukan bahwa para petambak udang (laki-laki) di Dipasena diakui sebagai nelayan perikanan pada kolom profesi di KTP, namun menurut ketua P3UW (Persatuan Petambak Pengusaha Udang Wilayah) Lampung tidak satupun dari mereka yang memiliki Kartu Nelayan. Bagaimana pandangan Bapak tentang itu?

Definisi formal nelayan adalah mereka yang berprofesi menangkap ikan. Orang Dipasena sebenarnya adalah petambak. Saya tidak paham mengapa mereka disebut nelayan dan bukan petambak. Namun demikian, sebenarnya hal ini bergantung juga pada pemerintah daerah, tingkat kabupaten utamanya, mengimplementasikan berbagai aturan aturan perikanan. Jika mereka melihat formalitasnya, para

petambak ini seharusnya bisa mendapat KN karena pada KTP mereka status pekerjaannya adalah nelayan. Namun bisa jadi para petambak ini memahami realitasnya sebagai petambak dan dalam definisi negara mereka berada pada kategori yang berbeda dengan nelayan. Kartu Nelayan hanya diberikan pada mereka yang menangkap ikan, sementara petambak yang di KTP tercatat sebagai nelayan tapi profesi sehari-hari sebagai petambak. Saya duga ini yang dijadikan dasar bagi Pemda khususnya Dinas Perikanan untuk tidak memberikan mereka kartu nelayan. Ini sebenarnya persoalan dari implementasi aturan pemerintah. Sebenarnya jika kita merujuk pada UU Perlindungan Nelayan, maka petambak pembudidaya ikan dan petambak garam seharusnya mereka menjadi subjek perlindungan. Mereka yang termuat dalam pendefinisian tersebut seharusnya mendapat hak atas perlindungan dari negara.

Ketika petambak udang (laki-laki) yang sudah diakui sebagai nelayan di KTP saja sulit untuk mengakses hak atas Kartu Nelayan, ini artinya proses pengakuan perempuan yang berprofesi sebagai petambak akan jauh lebih sulit lagi. Apakah demikian Pak?

Iya benar. Mengapa demikian? Karena kita cenderung melihat perempuan dalam posisi di rumah tangga dan bukan dirinya sebagai individu. Ketika perspektif kita adalah rumah tangga, maka laki-laki dilihat sebagai kepala rumah tangga. Maka kebijakan berfokus atau diprioritaskan pada laki-laki. Meskipun kita tidak bisa mengelak bahwa ada juga perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Menurut saya sulitnya pengakuan atas petambak perempuan adalah keterkaitan yang saling menguatkan antara kultur dan kebijakan negara yang mendiskriminasi perempuan. Jadi untuk mengubah kondisi ini dibutuhkan perubahan pada dua aspek tersebut.

Profesi nelayan amat penting bagi kelangsungan ketahanan pangan negara, tapi hingga saat ini hidup mereka masih identik dengan kemiskinan dan berpendidikan rendah. Bagaimana pandangan Bapak terhadap situasi ini?

Menurut saya cara pandang kita terhadap mereka harus diubah. Kita, sebagai bangsa maupun pemerintah, seringkali hanya mengasosiasikan nelayan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, terbelakang. Meskipun sebagian ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar. Ini hanya satu wajah dari sekian banyak wajah kehidupan pesisir. Hal yang seringkali tidak kita hitung adalah, misalnya, mereka adalah satu-satunya komunitas

yang mampu mengonversi ikan liar yang bergerak dalam ruang tiga dimensi di laut, yang tidak kelihatan, menjadi pemasok protein hewani penting untuk kita bangsa ini. Ikan yang mereka tangkap itu tidak sedikit, tahun 2015, kira-kira ada 6 juta ton ikan yang mereka tangkap, dan 80 persennya dikonsumsi bangsa ini. Hanya 20 persen yang dijual ke luar negeri. Lebih jauh, bukan hanya kemampuan mereka menangkap ikan itu saja yang harus kita apresiasi, tetapi profesi nelayan itu sendiri. Menangkap ikan bukan hanya sulit tapi juga berbahaya. Dibutuhkan keberanian dari mereka untuk mendapatkan ikan setiap saat pergi melaut, berbeda dengan saat kita pergi ke sawah atau ladang, di laut, nelayan seringkali terancam bahaya yang bisa berujung kematian, baik karena ombak ataupun arus.

Pendidikan nelayan memang rendah, dalam artian pendidikan formal, namun tidak berarti bahwa mereka bodoh. Seringkali, mereka dipandang sebagai komunitas yang bodoh, padahal tidak demikian. Saya berani bertaruh jika saya bandingkan pengetahuan nelayan dengan sarjana perikanan, nelayan akan jauh lebih pandai dalam menyebut nama dan perilaku ikan. Jadi tidak tepat kalau mereka dikatakan bodoh. Pendidikan formal mereka rendah itu benar. Cara pandang yang melihat bahwa nelayan adalah orang bodoh menurut saya tidak adil dan itu harus diubah. Kita harus mengapresiasi keahlihan dan kehidupan mereka.

Penting bagi kita untuk mengapresiasi kehidupan nelayan. Dengan mengapresiasi artinya kita akan memerhatikan kepentingan mereka pada kehidupan sehari-hari, termasuk pada aspek kehidupan politik. Dari segi politik mereka juga termarginalkan. Hidup nelayan tidak seperti dinamika kehidupan orang-orang yang bekerja di darat. Siang hari para nelayan biasanya istirahat sedangkan malam hari mereka bekerja. Sementara keputusan-keputusan politis yang penting diambil saat siang hari, sehingga mereka absen dari proses-proses politik. Demikian halnya informasi pasar, karena kehidupan pasar lebih didominasi sistem yang berlaku di darat, nelayan seringkali terbatas pengetahuannya. Ini menyebabkan hidup mereka seringkali didominasi oleh pihak-pihak lain seperti misalnya tengkulak. Jika kita mengapresiasi hidup mereka, mengidentifikasi karakteristik yang positif selain kelemahan mereka, kemudian mengakui pentingnya kontribusi mereka pada kehidupan bangsa ini, maka kita akan memiliki empati untuk melindungi dan mengapresiasi mereka. Pada saat kebijakan negara diputuskan mereka tidak lagi kita lupakan.

Kembali pada realitas bahwa meskipun total ikan kita banyak, sebagian diantaranya adalah komoditas yang sudah *overexploited*. Bila kita bicara soal peningkatan produksi perikanan, kita harus menargetkan pada ikan yang masih banyak dan bukan yang *overexploited*. Biasanya ikan yang masih banyak jumlahnya ini berada pada perairan yang cukup jauh dari pesisir. Tentu saja untuk menangkap dibutuhkan alat tangkap dan kapal yang lebih besar. Persoalannya bantuan terkait itu hanya mempertimbangkan sisi teknisnya saja, misalnya pemerintah pada zaman sebelum Ibu Susi pernah mengadakan program bantuan 1.000 kapal. Mereka membagikan kapal-kapal besar, mendorong nelayan ke tengah laut. Tujuannya benar dan baik, yaitu mendorong mereka ke luar dari kawasan yang sudah *overexploited*, tapi persoalannya bukan sekadar teknis karena ketiadaan kapal dan alat tangkap, tapi ini terkait pula dengan pengetahuan. Kegiatan nelayan (tradisional) selama ini adalah melaut di pesisir dengan kapal kecil sehingga pengetahuannya terbatas pada ekosistem pesisir, jadi jika dia harus didorong ke tengah laut, mereka harus diberi pelatihan tentang karakteristik laut dan sumber daya ikan yang ada di tengah laut. Masalah lainnya adalah, pengalaman pendidikan formal nelayan itu sedikit, karakteristik mereka adalah belajar dari pengalaman, dari praktik. Jadi jika mereka diberi kapal, alat tangkap dan pelatihan di kelas, ini menjadi tidak memadai. Karakteristik mereka adalah belajar dari pengalaman, jadi mereka seharusnya diberi pelajaran melalui sistem magang di kapal-kapal yang akan mereka gunakan nantinya, sehingga mereka bisa mempraktikkan pembelajaran seperti halnya mereka mempelajari pengetahuan dan keahlian kenelayanan-kenelayanan sebelumnya. Pendekatan semacam ini tidak dipakai, karena absennya pemahaman atas karakteristik nelayan.

Selain itu kita juga harus melihat perikanan sebagai sebuah sistem, ia bukan sekadar kegiatan menangkap ikan, tapi di dalamnya ada pengolahan, pemasaran dan konsumsi. Selama ini proses pemasaran kurang mempertimbangkan program-program yang memusatkan perhatian pada kapal. Padahal, misalkan mereka berhasil menangkap ikan tetapi mereka tidak terkoneksi dengan pasar bisa jadi para nelayan ini tidak mendapat pemasukan sesuai dengan produksinya. Bahkan pendapatan mereka bisa menjadi lebih rendah, tidak jarang para nelayan ini dimanipulasi oleh makelar. Pemahaman tentang konektivitas seperti itu seharusnya dipahami dan dijadikan dasar perumusan kebijakan perikanan.

Nelayan termarginalkan dari aspek politik saat mereka tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan. Dalam hal ini nelayan perempuan juga mengalami persoalan yang sama, tidak jarang situasi ini menyebabkan tidak terakomodasinya kebutuhan mereka dan terjadinya program pemberdayaan yang tidak tepat sasaran. Bagaimana agar kondisi ini dapat diperbaiki?

Perempuan posisinya memang dimarginalkan. Posisi nelayan secara umum dari perspektif bangsa dan negara saja dipandang rendah, apalagi nelayan perempuan. Mereka pada posisi yang lebih rendah lagi, bahkan tidak terlihat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengubah kondisi ini. Pertama, kita harus mendorong agar para nelayan membentuk asosiasi-asosiasi nelayan, sehingga kepentingan politiknya bisa disuarakan sebagai sebuah kelompok dan sebagai sebuah komunitas. Saat ini sudah mulai ada gerakan semacam ini tapi menurut saya gerakan ini belum sampai pada taraf nasional.

Kedua, nelayan perempuan juga perlu masuk ke dalam organisasi-organisasi nelayan, menjadi bagian dari organisasi yang kemungkinan besar didominasi oleh laki-laki. Bisa juga mereka membuat perkumpulan sendiri untuk perempuan nelayan. Tujuannya agar mereka *visible*. Tantangannya bagi perempuan bila masuk ke dalam organisasi yang didominasi oleh laki-laki mungkin lebih sulit karena pertama mereka secara internal harus menunjukkan eksistensi mereka di dalam organisasi itu sendiri. Baru, jika kaum lelaki di dalam organisasi itu menyadari pentingnya perempuan, mereka akan menyuarakan kepentingan perempuan sebagai kepentingan organisasi nelayan. Tantangan untuk mengekspresikan kepentingannya akan lebih kecil jika perempuan membentuk asosiasi nelayan perempuan secara independen, tapi ia bisa jadi dianggap pesaing kelompok nelayan laki-laki. Alternatif ketiga adalah membuat asosiasi nelayan yang inklusif, menghimpun semua laki-laki maupun perempuan yang terlibat baik dalam penangkapan, pengolahan maupun pemasaran. Meskipun organisasinya akan menjadi "gendut" yang juga akan merupakan tantangan sendiri, persoalan-persoalan dalam dunia perikanan yang kait-mengkait antara produksi, pengolahan dan pemasaran akan terpetakan secara terintegratif, kepentingan semua pihak terwakili. Organisasi-organisasi semacam ini harus mendesak dinas-dinas terkait maupun pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Dengan itu, kebijakan-kebijakan yang keluar akan lebih inklusif, tidak memarginalkan pihak-pihak tertentu.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

